



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **A. DAMENTA**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**A. DAMENTA**

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,



**TRI NURTOPO, MT**

**NIP. 19660530 199003 1 003**

**SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**

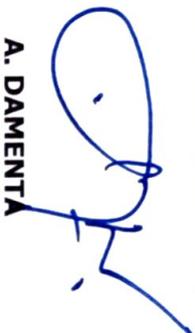
**DPA TA-2025**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Perhubungan	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,74
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,30
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	84

**BELANJA DAERAH**

<b>KODE</b>	<b>URUSAN/PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>93.043.250.000</b>
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	49.563.541.000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	41.913.566.630
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	841.512.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAPIAN	724.630.370
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.043.250.000</b>

**Pj. GUBERNUR BANTEN,**



**A. DAMENTA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,**



**TRI NURTOPO, MT**

**NIP. 19660530 199003 1 003**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUSKA DESWIANTO**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**TRI NURTOPO, MT**  
NIP. 19660530 199003 1 003

**Drs. SUSKA DESWIANTO**  
NIP. 19691228 199203 1 002

**SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN****DPA TA-2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100

**BELANJA**

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
<b>2.15.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>520.000.000</b>
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.000.000
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26.317.643.000</b>
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.297.000.000
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.445.000
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	798.000
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.100.000
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.464.000

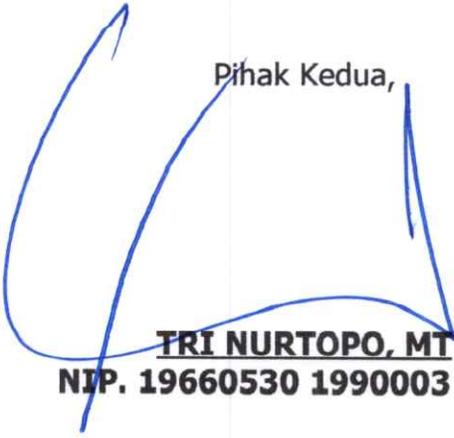
<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.886.000
<b>2.15.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000
<b>2.15.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>732.516.000</b>
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.820.000
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.696.000
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.220.304.000</b>
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.550.000.000
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	350.000.000
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.304.000
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.900.000.000</b>
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000.000
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000.000
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.146.920.000</b>
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.046.920.000
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

  
**Drs. SUSKA DESWIANTO**  
**NIP. 19691228 199203 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**TRI NURTOPO, MT**

**NIP. 19660530 1990003 1 003**

**MOH. AMIN, S.Sos**

**NIP. 19670205 198801 1 002**

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

DPA TA-2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	Persen	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	Persen	100

**BELANJA**

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	500.000.000
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	500.000.000
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341.512.000
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341.512.000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur	724.630.370
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	724.630.370

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
NIP. 19660530 1990003 1 003

  
**MOH. AMIN, S.Sos**  
NIP. 19670205 198801 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**

**SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN**

**DPA TA-2025**

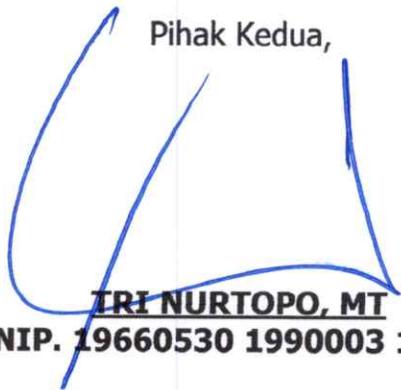
<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ (LLAJ)	Persentase Ketercapaian Pemenuhan kebutuhan angkutan masal	Persen	100

**BELANJA**

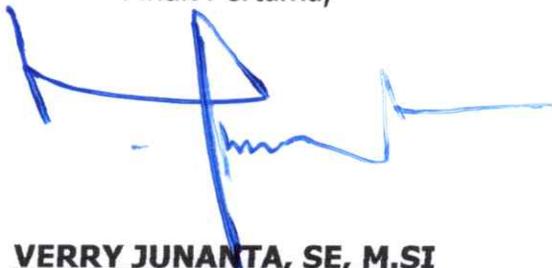
<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>400.000.000</b>
2.15.02.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000
<b>2.15.02.1.08</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>2.284.357.000</b>
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.254.357.000
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

Pihak Pertama,

  
**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

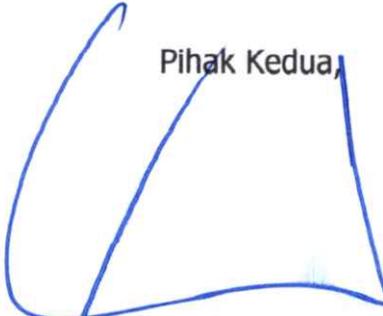
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,  
  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

  
**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	Persen	20

**BELANJA**

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>5.330.755.000</b>
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10.000.000
2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2.500.000.000
2.15.02.1.05.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	10.000.000
2.15.02.1.05.07	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.810.755.000
<b>2.15.02.1.06</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</b>	<b>20.000.000</b>
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	10.000.000
<b>2.15.02.1.07</b>	<b>Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>4.818.412.500</b>
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	5.000.000
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan	5.000.000
2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	300.000.000
2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	5.000.000

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4.503.412.500

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,



**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

Pihak Pertama,



**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **Plt. KEPALA KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**TRI NURTOPO, MT**  
NIP. 19660530 1990003 1 003

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,

**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19830705 200112 1 002

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Persen	75
		Persentase Pelaksanaan MRLL dan Penyediaan, Pemeliharaan Jalan	Persen	100
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas	Persen	20
		Persentase Perencanaan Transportasi Yang Diterapkan	Persen	50

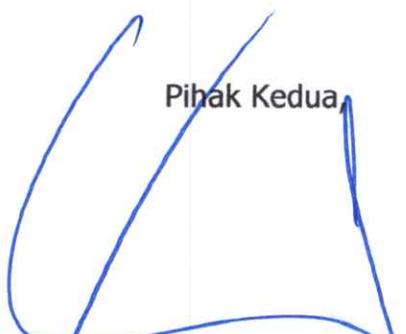
**BELANJA**

<b>BELANJA KODE</b>	<b>URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>27.681.587.500</b>
2.15.02.1.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	2.850.000.000
2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	23.631.587.500
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500.000.000
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	700.000.000
<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>345.936.630</b>
2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	345.936.630

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

  
**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
**NIP. 19830705 200112 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TRI NURTOPO, MT**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

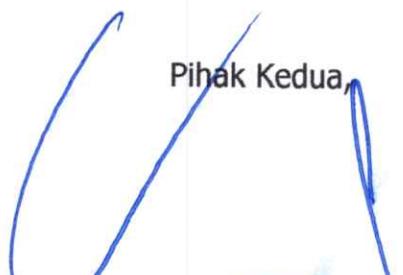
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 199003 1 003**

  
**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (UPTD)	Persen	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Ketersediaan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi (UPTD)	Persen	75

**BELANJA**

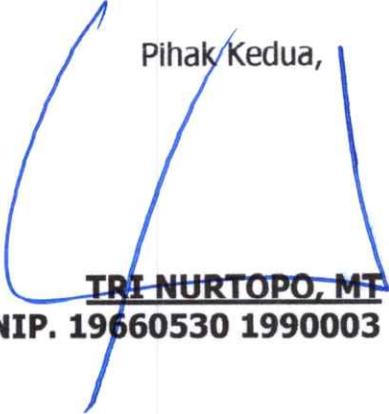
BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.618.000</b>
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.130.000
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.488.000
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>426.906.000</b>
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.906.000
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.765.978.000</b>
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.684.978.000
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.656.000</b>
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.890.000

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.766.000
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>1.032.518.000</b>
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.032.518.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**TRI NURTOPO, MT**  
**NIP. 19660530 1990003 1 003**

  
**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SUSKA DESWIANTO**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Drs. SUSKA DESWIANTO**  
NIP. 19691228 199203 1 002

  
**H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si**  
NIP. 19770703 200902 1 001

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	96
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1
24	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	45
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	110
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4

## BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
<b>2.15.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>520.000.000</b>
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.000.000
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.000.000
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>26.317.643.000</b>
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.297.000.000
2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	885.950.000
2.15.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	85.445.000
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	798.000
2.15.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	19.100.000
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	25.464.000
2.15.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.886.000
<b>2.15.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>50.000.000</b>
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000
<b>2.15.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>
2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	150.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Fungsi	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>732.516.000</b>
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.000.000
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72.820.000
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000.000
2.15.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.696.000
2.15.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.220.304.000</b>
2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.550.000.000
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	350.000.000
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.304.000
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.900.000.000</b>
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.900.000.000
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000.000
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.146.920.000</b>
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.046.920.000
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000

Serang, 8 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**Drs. SUSKA DESWIANTO**  
**NIP. 19691228 199203 1 002**

  
**H. TUBAGUS AAN ANDRIAWAN, SE, M.Si**  
**NIP. 19770703 200902 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **USEP HERDIANA, S.Sos, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PERHUBUNGAN UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**MOH. AMIN, S.Sos**  
**NIP. 19670205 198801 1 002**

**USEP HERDIANA, S.Sos, MM**  
**NIP. 19710325 199312 1 004**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	5

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
2.15.05.1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	724.630.370
2.15.05.1.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	724.630.370

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**MOH. AMIN, S.Sos**  
NIP. 19670205 198801 1 002



**USEP HERDIANA, S.Sos, MM**  
NIP. 19710325 199312 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAN WAHYU, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KEPELABUHAN DAN ASDP**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MOH. AMIN, S.Sos**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN LAUT UDARA DAN PERKERETAAPIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**MOH. AMIN, S.Sos**  
NIP. 19670205 198801 1 002

**IMAN WAHYU, SE, M.SI**  
NIP. 19750626 200112 1 003

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan	3
2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit	1

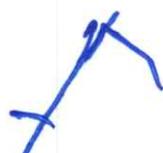
**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
2.15.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	500.000.000
2.15.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	500.000.000
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341.512.000
2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	341.512.000

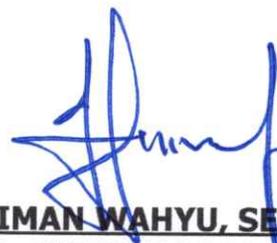
Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**MOH. AMIN, S.Sos**  
NIP. 19670205 198801 1 002



**IMAN WAHYU, SE, M.SI**  
NIP. 19750626 200112 1 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ERIK HERLAMBANG, ST, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**

Pihak Pertama,

**ERIK HERLAMBANG, ST, MM**  
**NIP. 19700827 200112 1 002**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen	2

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>400.000.000</b>
2.15.02.1.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000
2.15.02.1.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	200.000.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,



**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**

Pihak Pertama,



**ERIK HERLAMBA, ST, MM**  
**NIP. 19700827 200112 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI ANGKUTAN JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VERRY JUNANTA, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**

**ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM**  
**NIP. 19760412 200112 1 002**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Laporan	3
2	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	100

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.284.357.000
2.15.02.1.08.0001	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	2.254.357.000
2.15.02.1.08.0002	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	30.000.000

Serang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**VERRY JUNANTA, SE, M.SI**  
**NIP. 19750616 200112 1 003**



**ALDI MOHAMAD PRINALDI, SE, MM**  
**NIP. 19760412 200112 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE NURYASIN, SE, M.SI**

Jabatan : **KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

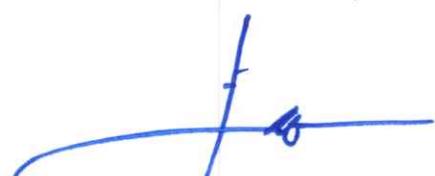
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

  
**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**

Pihak Pertama,

  
**ADE NURYASIN, SE, M.SI**  
**NIP. 19780105 200112 1 001**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1
2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	4
3	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	1
4	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	400
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1
6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Laporan	1

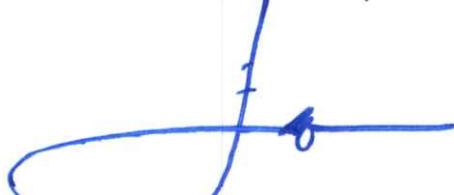
**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>5.330.755.000</b>
2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10.000.000
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	2.500.000.000
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	10.000.000
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.810.755.000
<b>2.15.02.1.06</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>20.000.000</b>
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	10.000.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,



**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**

Pihak Pertama,



**ADE NURYASIN, SE, M.SI**  
**NIP. 19780105 200112 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHOLID, S.Ag., M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI BINA KESELAMATAN LALU LINTAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS JALAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

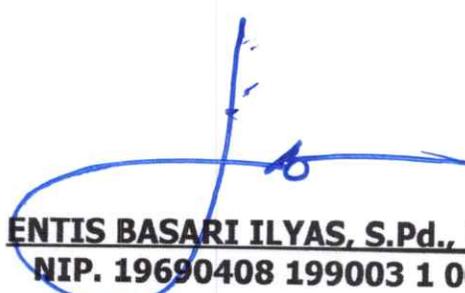
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**

  
**KHOLID, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19710209 200112 1 005**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan	1
2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1
3	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah Kawasan Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit	1
4	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah Lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Dokumen	1
5	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi	15

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.07	Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4.818.412.500
2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	5.000.000
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.000.000
2.15.02.1.07.0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	300.000.000
2.15.02.1.07.0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	5.000.000
2.15.02.1.07.0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4.503.412.500

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**ENTIS BASARI ILYAS, S.Pd., M.M**  
**NIP. 19690408 199003 1 001**

**KHOLID, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 19710209 200112 1 005**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. DANI HENDRA**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PRASARANA JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **Plt. KEPALA KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
**NIP. 19830705 200112 1 002**

**Drs. DANI HENDRA**  
**NIP. 19720602 199202 1 001**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit	9
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	10
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen	2

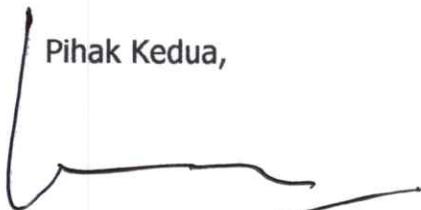
**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>27.681.587.500</b>
2.15.02.1.02.0	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	2.850.000.000
2.15.02.1.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	500.000.000
<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>345.936.630</b>
2.15.02.1.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	345.936.630

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,




**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
**NIP. 19830705 200112 1 002**

**Drs. DANI HENDRA**  
**NIP. 19720602 199202 1 001**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMATULLAH, S.Kom**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PERLENGKAPAN JALAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN PERLENGKAPAN JALAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
**NIP. 19830705 200112 1 002**

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,

**RAHMATULLAH, S.Kom**  
**NIP. 19740903 200112 1 006**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	1330
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit	83

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	27.681.587.500
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	23.631.587.500
2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	700.000.000

Pihak Kedua,



**TEDDY HENDRA PRATAMA, S.STP., M.Si.**  
NIP. 19830705 200112 1 002

Serang, Januari 2025

Pihak Pertama,



**RAHMATULLAH, S.Kom**  
NIP. 19740903 200112 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**

Pihak Pertama,

**RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM**  
**NIP. 19730706 200112 1 002**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	11
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10
9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.618.000</b>
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.130.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000
2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.488.000
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>426.906.000</b>
2.15.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	426.906.000
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.765.978.000</b>
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.684.978.000
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.656.000</b>
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.890.000
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.766.000

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**

Pihak Pertama,

**RAHMAT GUNAWAN, S.IP, S.Mn, MM**  
**NIP. 19730706 200112 1 002**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDE GUNADI, S.IP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA PERHUBUNGAN DARAT DAN  
PENGENDALIAN OPERASIONAL ANGKUTAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**

Jabatan : **KEPALA UPTD PENGELOLAAN PRASARANA  
PERHUBUNGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**

**DEDE GUNADI, S.IP**  
**NIP. 19670911 198903 1 011**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	90

**BELANJA**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>1.032.518.000</b>
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.032.518.000

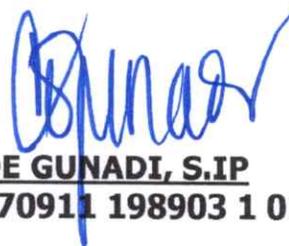
Serang, Januari 2025

Pihak Kedua,



**BAYU ADI PUTRANTO, SE, MM**  
**NIP. 19850623 200912 1 002**

Pihak Pertama,



**DEDE GUNADI, S.IP**  
**NIP. 19670911 198903 1 011**